

PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI YANG ADAPTIF PADA UKM BERBASIS SAK ETAP UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN KUALITAS PELAPORAN BISNIS

Darmansyah,

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
darmansyah@esaunggul.ac.id

Abstract

The long-term goal to be achieved is the creation of an SME accounting software application system model based on the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) that is innovative and adaptive to the SME business environment, accurate, inexpensive, and fast and saves time in the accounting process. SAK ETAP is a manifestation of normative accounting in corporate accounting processes with accounting practices that should be implemented, and bases accounting policies on principal based and judgment. The research object chosen is Small and Medium Enterprises. This selection is determined to determine the SME business processes, and information output in supporting business decision making. However, the accounting process in SME business activities is simple so that it cannot support SMEs' productivity and performance improvements, and the quality of financial reporting. The inability to provide and use accounting information is one of the weaknesses of the management of SMEs. This weakness is a major factor resulting in the failure of SMEs in developing business. This research design uses a research and development approach carried out in accounting and computing laboratories to produce SME accounting software application systems based on Microsoft Access (MS access). The design process is divided, that is, first, the manual design of the SME accounting system. Second, the design of SME accounting software applications through the MS Access program. Research techniques using case studies in SME companies.

Keywords: *accounting policy, accounting system, SAK ETAP*

Abstrak

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah terciptanya model sistem aplikasi software akuntansi UKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang inovatif dan adaptif terhadap lingkungan bisnis UKM, akurat, murah, serta cepat dan menghemat waktu dalam proses akuntansi. SAK ETAP merupakan manifestasi dari akuntansi normative dalam proses akuntansi perusahaan dengan praktek akuntansi yang seharusnya dilaksanakan, dan mendasarkan kebijakan akuntansi pada principal based dan judgement. Obyek penelitian yang dipilih adalah Usaha Kecil dan Menengah. Pemilihan ini ditentukan untuk mengetahui proses bisnis UKM, dan keluaran informasi dalam dalam menunjang pengambilan keputusan bisnis. Namun, proses akuntansi dalam kegiatan bisnis UKM bersifat sederhana sehingga tidak mampu menunjang terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja UKM, serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Ketidakmampuan menyediakan dan menggunakan informasi akuntansi merupakan salah satu kelemahan dari sisi manajemen UKM. Kelemahan ini merupakan faktor utama yang mengakibatkan kegagalan UKM dalam mengembangkan usaha. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan riset and development yang dilakukan di laboratorium akuntansi dan komputasi untuk menghasilkan program sistem aplikasi software akuntansi UKM berbasis Microsoft Access (MS access). *Proses perancangan terbagi, yaitu, pertama, perancangan manual system akuntansi UKM. Kedua, Perancangan aplikasi software akuntansi UKM melalui program MS Access. Teknik penelitian menggunakan studi kasus pada perusahaan UKM.*

Kata kunci: kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, SAK ETAP

Pendahuluan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah usaha kecil yang unit bisnisnya dikelola oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun kelompok kecil secara kekeluargaan. Peranan UKM adalah menyediakan alternatif kegiatan usaha produktif, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menerima penyaluran kredit mikro, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil penelitian dari *Indonesia Small Business Research Center* (2003) menunjukkan bahwa UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 88%, memberi kontribusi pada *Produced domestic bruto* sebesar 40%, serta penting bagi pertumbuhan ekspor non migas.

Jumlah UKM di Indonesia saat ini menunjukkan prosentase 99% dari jumlah unit usaha yang ada. Besarnya jumlah UKM tersebut dapat memperkuat struktur ekonomi domestik karena menyerap angkatan kerja, terjadi peningkatan daya beli masyarakat, meningkatkan permintaan, dan meningkatkan pertumbuhan investasi. Dengan jumlah UKM yang sangat besar dengan mencapai jumlah ± 40.000.000 maka dapat diperkirakan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Misalnya, tenaga kerja yang bekerja pada sektor UKM mencapai 96 persen (2000-2006) terhadap total tenaga kerja yang tersebar di sembilan sektor ekonomi Indonesia, serta pencapaian kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 40%. Hasil penelitian Arif dan Wibowo (2005) menguatkan peranan UKM dalam perekonomian dengan sumbangan UKM pada nilai tambah industri kecil dan rumah tangga pada tahun 2002 sebesar 6,10% dibandingkan sumbangan industri besar dan sedang, yaitu 3,80%.

Peranan UKM di Indonesia sangat penting dilakukan karena fungsi sosial ekonomi yang strategis. UKM mampu memperkuat struktur ekonomi domestik karena menyerap angkatan kerja, meningkatkan daya beli, meningkatkan permintaan dan pertumbuhan investasi. Meskipun UKM mempunyai peranan strategis, UKM juga memiliki masalah yang kompleks. Najib (2006) dan Dedy Handrimurtjahyo dkk (2007), menyatakan bahwa faktor yang menghambat UKM datang dari internal dan eksternal, yaitu lemahnya

pengetahuan pasar, kekuatan ketahanan lemah, modal yang lemah, serta teknologi yang rendah. Sedangkan dari eksternal adalah globalisasi untuk persaingan pasar, lemahnya pengaturan dan penengakan hukum, rendahnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk, serta lemahnya dukungan infrastruktur bagi sentra produksi UKM. Barbara, *et al* (2000), menyatakan bahwa permasalahan bidang pemasaran, keuangan, dan manajemen sangat berpengaruh terhadap pengembangan UKM.

Permodalan merupakan faktor utama dalam pengembangan usaha. Modal yang kurang bagi UKM sering terjadi karena usaha ini lebih banyak mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya terbatas. Apabila pemilik UKM melakukan pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya akan sulit sulit diperoleh karena persyaratan administratif seperti pemenuhan Laporan Keuangan. Persyaratan ini penting untuk melihat kinerja usaha serta informasi tersebut mampu mengembalikan pinjaman atautah tidak. Ketiadaan Laporan Keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Keuangan untuk UKM akan menimbulkan potensi kerugian secara finansial.

Masalah lain yang sangat penting adalah pelaku tidak memahami pengetahuan tentang sistem akuntansi UKM. Sistem Akuntansi UKM memainkan peran strategis dalam keberhasilan usaha. Masalah proses bisnis dan keuangan terkait dengan operasional UKM memerlukan pemahaman masalah akuntansi secara mutlak. Pemantauan dan evaluasi proses bisnis yang benar, pemanfaatan dana yang optimal, alokasi kredit yang tepat, evaluasi kompetitor secara periodik, serta pengambilan keputusan yang efektif diperlukan dalam pembukuan UKM yang profesional. Theng dan Jasmine (1996) menyatakan bahwa penyebab kegagalan UKM berasal dari faktor luar dan dalam perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Misalnya, *personality short coming*, *financialand accounting* dan *operational short coming*. Ketidakmampuan menyediakan dan menggunakan informasi akuntansi merupakan salah satu kelemahan dari sisi manajemen yang mengakibatkan kegagalan UKM dalam mengembangkan usaha.

Informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi UKM, karena merupakan

alat yang digunakan oleh pengguna informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan yang sangat diperlukan oleh pihak manajemen dalam merumuskan berbagai keputusan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Selain itu informasi akuntansi juga berguna dalam rangka menyusun berbagai proyeksi, misalnya proyeksi kebutuhan uang kas di masa yang akan datang, mengontrol biaya, mengukur dan meningkatkan produktivitas dan memberikan dukungan terhadap proses produksi. Gudono (2007), berpendapat bahwa informasi akuntansi merupakan salah satu alat yang digunakan manajemen untuk membantu menghadapi persaingan bisnis. Informasi akuntansi menghasilkan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk perencanaan, pengendalian, pembuatan keputusan dan evaluasi kinerja. Informasi akuntansi memungkinkan manajemen untuk mengimplementasikan strategi dan melakukan aktivitas operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi UKM di Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Undang-undang UKM No. 9 tahun 1995 dan Undang-undang perpajakan No 2 Tahun 2007 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Pemerintah maupun komunitas akuntansi telah menegaskan pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan informasi akuntansi bagi UKM. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar UKM di Indonesia belum menyelenggarakan dan memanfaatkan akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Hasil studi Idrus (2000) menyatakan para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan.

Informasi Akuntansi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Namun praktek akuntansi keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2004; Raharjo &

Ali, 1993; Benjamin, 1990; Muntoro, 1990). Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UKM dalam menyusun laporan keuangan. Benjamin (1990) berpendapat bahwa kelemahan UKM dalam penyusunan laporan keuangan itu antara lain disebabkan rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM (Muntoro, 1990).

Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten. Namun karena UKM memiliki berbagai keterbatasan, kewajiban seperti itu diduga dapat menimbulkan biaya yang lebih besar bagi UKM dibandingkan dengan manfaat yang dapat dihasilkan dari adanya informasi akuntansi tersebut (*cost-effectiveness*). Di samping itu, tersedianya informasi yang lebih akurat melalui informasi akuntansi yang dihasilkan diduga tidak mempengaruhi keputusan atas masalah yang dihadapi manajemen (*relevance*).

Masalah utama dalam pengembangan UKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan dalam usahanya tersebut, karena pengelolaan yang baik memerlukan keterampilan Akuntansi yang baik pula oleh pelaku bisnis UKM. Padahal dengan adanya laporan keuangan akan memungkinkan pemilik memperoleh data dan informasi yang tersusun secara sistematis. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi konkret keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada asumsi semata.

Tujuan Khusus

Tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya sistem aplikasi *software* akuntansi UKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang inovatif dan adaptif terhadap bisnis UKM, akurat, murah, cepat dan hemat waktu dalam

proses akuntansi. SAK ETAP merupakan manifestasi dari akuntansi normatif dalam praktek akuntansi yang seharusnya dan mendasarkan pada *principal based*.

Kontribusi Mendasar Pada Bidang Ilmu

Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada bidang ilmu akuntansi keuangan dan system informasi akuntansi. Teori akuntansi *normative* dalam proses akuntansi perusahaan selama ini didominasi oleh praktek akuntansi yang seharusnya, manual, bersifat konservatif, dan lebih mengacu pada *rule based*. SAK ETAP sebagai dasar kebijakan akuntansi perusahaan bersifat *principal based* dan *judgement*. Hasil penelitian adalah pembentukan model system aplikasi *software* akuntansi untuk melakukan praktek akuntansi dalam kegiatan aktivitas bisnis UKM. Informasi akuntansi sangat bermanfaat mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan yang sangat diperlukan oleh pihak manajemen dalam merumuskan berbagai keputusan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Selain itu informasi akuntansi juga berguna dalam rangka menyusun berbagai proyeksi, misalnya proyeksi kebutuhan uang kas di masa yang akan datang, mengontrol biaya, mengukur dan meningkatkan produktivitas dan memberikan dukungan terhadap proses produksi. Informasi akuntansi menghasilkan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk perencanaan, pengendalian, pembuatan keputusan dan evaluasi kinerja. Informasi akuntansi memungkinkan manajemen untuk implementasi strategi dan melakukan aktivitas operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Pentingnya Penelitian

Disamping itu, kondisi faktual di lapangan, UKM tidak dapat membuat laporan keuangan sehingga tidak mampu untuk membuat laporan pajak kepada pemerintah. Kesulitan yang terjadi bagi industri UKM ini adalah tingkat pendidikan yang rendah karena sebagian besar rata-rata pengelola adalah hanya lulusan SMA, tidak mampu melakukan perhitungan matematik untuk memperoleh laba karena pengelola hanya mempertemukan proses input dan output secara sederhana dan

pragmatis, tidak memahami bahwa setiap kegiatan produktif yang menghasilkan nilai ekonomis akan terkena aspek perpajakan, serta kesulitan untuk membuat pelaporan kegiatan produksinya kepada eksternal.

Kondisi tersebut di atas akan menyulitkan pengembangan bagi UKM di masa datang bilamana skala ekonominya ditingkatkan pada *level* yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan ketentuan dari eksternal bilamana industri UKM membutuhkan bantuan permodalan dari pihak perbankan akan mensyaratkan pembuatan laporan keuangan, dan pihak industri UKM tersebut tidak mampu memenuhinya. Hal ini akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan industri UKM. Disisi lain, karena tidak mampu membuat laporan keuangan maka berakibat industri UKM kesulitan untuk menghitung berapa pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Masalah-masalah inilah yang menghinggapi kondisi dan situasi industri UKM.

Usaha Kecil

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9. Menurut Pasal 5 ayat 1, kriteria usaha kecil adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,-.
3. Milik WNI
4. Berdiri sendiri dan bukan anak/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha menengah/usaha bersama.
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Karakteristik usaha kecil sangat khas, yaitu: komoditi yang diusahakan umumnya tetap; tempat usaha umumnya permanen dan tidak berpindah; administrasi keuangan dilakukan secara sederhana; keuangan

perusahaan mulai dipisahkan dengan kekayaan pribadi; sudah membuat neraca usaha; sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP; sumberdaya manusia memiliki pengalaman dalam berwirausaha; sebagian sudah akses ke perbankan dalam permodalan; dan sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*. Contoh Usaha Kecil adalah, usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; pedagang dipasar grosir dan pedagang pengumpul lainnya; pengrajin industri makanan dan minuman; industri meubelair; kayu dan rotan; industri alat-alat rumah tangga; konveksi; *handycraft*; peternakan unggas; serta koperasi berskala kecil.

Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha produktif yang mempunyai kriteria berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai; dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai 10.000.000.000,- serta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha ini memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (inpres No. 10 Tahun 1998)

Ciri usaha menengah adalah umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur dengan pembagian tugas yang jelas, antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi; telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan pemeriksaan dan penilaian termasuk oleh perbankan; telah melakukan pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, dan pemeliharaan kesehatan. Usaha menengah memiliki persyaratan legalitas antara lain: izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, akses kepada sumber pendanaan perbankan, serta memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Jenis usaha memiliki lingkup komoditi seluruh sektor usaha, yaitu: usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah, usaha perdagangan termasuk ekspor dan impor; usaha jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut, garment dan

jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi, usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam, serta usaha pertambangan untuk konstruksi.

Sistem Informasi

Sistem adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan, terintegrasi, dan berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang mempunyai nilai dan berguna dalam pengambilan keputusan. Sistem hampir pasti selalu terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil, masing-masing memiliki fungsi spesifik yang mendukung sistem yang lebih besar. Sistem informasi memproses data transaksi bisnis sehingga menghasilkan keluaran berupa informasi yang berguna dan bernilai tambah bagi pemakainya. Nilai tambah dari Sistem Informasi adalah memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya produksi dan jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki *decision making capabilities*, serta menaikkan *the sharing of knowledge* (McLeod, 2001). Sistem akuntansi bekerja dengan mengumpulkan data tentang aktifitas perusahaan dan transaksi, mengubah data menjadi informasi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan perusahaan, serta memastikan ketersediaan, keandalan dan keakuratan dari informasi.

Hasil Studi Pendahuluan

- Faktor penghambat UKM datang dari internal dan eksternal, yaitu lemahnya pengetahuan pasar, kekuatan ketahanan dan modal yang lemah, teknologi yang rendah, globalisasi untuk persaingan pasar, lemahnya pengaturan dan penengakan hukum, rendahnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk, serta lemahnya dukungan infrastruktur bagi sentra produksi UKM (Dedy Handrimurtjahyo dkk, 2007; Najib, 2006).
- Barbara, *et al* (2000) menyatakan bahwa permasalahan bidang pemasaran, keuangan, dan manajemen sangat berpengaruh terhadap pengembangan UKM.
- Penyebab kegagalan UKM berasal dari faktor luar dan dalam perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen.

Misalnya, *personality short coming, financial and accounting* dan *operational short coming* (Theng dan Jasmine, 1996).

- d. Informasi akuntansi merupakan alat bagi manajemen untuk membantu menghadapi persaingan bisnis karena bersifat relevan dan tepat waktu untuk perencanaan, pengendalian, pembuatan keputusan dan evaluasi kinerja (Gudono, 2007).
- e. Pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan (Idrus, 2000).
- f. Praktek akuntansi keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2004; Raharjo & Ali, 1993; Benjamin, 1990; Muntoro, 1990). Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UKM dalam menyusun laporan keuangan.
- g. Kelemahan UKM dalam penyusunan laporan keuangan disebabkan rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Benjamin, 1990) dan rendahnya penyusunan laporan keuangan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM (Muntoro, 1990).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tindakan (*action research*) yang dilakukan kepada Usaha Kecil dan Menengah untuk melihat system akuntansi dalam kegiatan bisnis UKM mengenai pengukuran kinerja produktivitas dan kualitas pelaporan bisnis dalam pengambilan keputusan. Pendekatan tindakan dilakukan untuk memecahkan masalah system akuntansi terkait dengan kualitas pelaporan bisnis dan member konsekuensi pada pengukuran kinerja dan produktivitas UKM.

Jenis data berbentuk primer dan metode pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei. Data penelitian berupa data obyek yang menunjukkan rekaman kegiatan

transaksi bisnis dalam kegiatan operasional UKM. Unit analisis adalah perusahaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di UKM yang berada pada pembinaan PT. Jasa Marga Persero.

Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan di Jabodetabek dengan obyek penelitian adalah Usaha Kecil dan Menengah mulai Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 yang tergabung dalam UKM binaan PT. Jasa Marga Persero.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian adalah UKM di Jabodetabek yang tergabung dalam pembinaan PT Jasa Marga Persero. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Judgement - Purposive Sampling*, yaitu sampel diambil berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu. Kriterianya adalah, UKM melakukan pencatatan secara sederhana, UKM mempunyai system akuntansi yang sederhana, UKM yang mempunyai proses akuntansi sederhana. UKM yang melakukan pelaporan keuangan tidak berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ETAP, serta UKM melaksanakan siklus akuntansi dengan dasar akuntansi normative yang tidak sewajarnya.

Sumber Data

Berdasarkan sumber data, data yang dikumpulkan merupakan data primer. Data tersebut berupa Bukti transaksi adanya kegiatan bisnis UKM; Bukti pencatatan dalam UKM untuk mencatat kegiatan akuntansi pada saat pertama kejadian; Bukti pencatatan proses penggolongan dalam siklus akuntansi; Bukti pencatatan proses pengikhtisaran dalam siklus akuntansi; Bukti pencatatan proses pelaporan dalam siklus akuntansi; serta *Blue print* kebijakan akuntansi yang diterapkan pada UKM.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif dengan dasar perlakuan akuntansi secara *normative*. Teknik kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:18), yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Secara garis besar tiga tahap analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan

penyederhanaan dan abstraksi terhadap data yang telah terkumpul, meliputi: penggunaan penilaian pencatatan akuntansi dalam standar prosedur operasional yang berhubungan dengan kegiatan bisnis UKM, isi pencatatan siklus akuntansi UKM, isi penggolongan dalam siklus akuntansi UKM, isi pengikhtisaran siklus akuntansi UKM, isi pelaporan siklus akuntansi UKM, hasil pengamatan, dan catatan lapangan. Kegiatan penyederhanaan dan abstraksi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang jelas sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

b. Penyajian data

Pada tahap ini dilakukan pengorganisasian data yang telah direduksi. Seluruh informasi yang diperoleh dari reduksi disusun secara naratif untuk pembuatan kesimpulan. Penyusunan informasi ini dengan cara memadukan data yang telah diperoleh, baik dari observasi, survey, catatan siklus akuntansi UKM, catatan lapangan, maupun observasi.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang meliputi menentukan arti atau makna mengenai data yang telah diperoleh dan memberikan penjelasan, selanjutnya menguji kebenarannya dengan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Akuntansi UKM

- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya.
- b. Jika SAK ETAP secara spesifik mengatur transaksi, kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP. Namun, entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SAK ETAP jika dampaknya tidak material.
- c. Jika SAK ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, manajemen harus menggunakan pertimbangannya (judgement) untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan, reliable, dan wajar.
- d. Dalam membuat pertimbangan manajemen harus mengacu sumber-sumber berikut:

- 1) persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan isu yang serupa dan terkait; dan
- 2) definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan dan beban dan prinsip-prinsip pervasive.

Penerapan akuntansi melibatkan pembuatan kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di UKM. Kebijakan akuntansi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Periode penyusunan laporan keuangan menggunakan tahun buku.
2. Metode pembukuan menggunakan *accrual basis*.
3. Pengeluaran di atas jumlah Rp. 2.500.000,- di akui sebagai *cost* dan dilakukan kapitalisasi.
4. Penyusutan menggunakan metode yang digunakan dalam perpajakan.
5. Pemisahan yang jelas antara pemilik dengan pelaku usaha.
6. Perkiraan atau rekening menggunakan kode blok.
7. Kas kecil menggunakan metode *imprest fund*.
8. Pencatatan persediaan menggunakan metode *perpetual*.

Akuntansi Normatif Pada UKM

- 1). Pengakuan Dalam Laporan Keuangan
 - a. *Aset*. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
 - b. *Kewajiban*. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

- c. *Penghasilan*. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- d. *Beban*. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- e. *Laba atau Rugi*. Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan "matching concept".

2). Penilaian

Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

3). Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

- (a) *Biaya historis*. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang

diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajibandicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

- (b) *Nilai wajar* adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

4). Pelaporan

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Sistem Akuntansi UKM

Siklus Akuntansi UKM

Bisnis bergerak melalui suatu aktivitas. Pada awal siklus tersebut, manajemen merencanakan kemana bisnis akan dibawa dan memulai langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan operasi. Pada sepanjang siklus, yang biasanya selama satu tahun, akuntan mencatat aktivitas operasi dari usaha tersebut. Pada akhir siklus, akuntan menyiapkan laporan keuangan yang mengikhtisarkan aktivitas operasi sepanjang tahun tersebut. Kemudian akuntan menyiapkan akun-akun untuk mencatat aktivitas operasi pada siklus berikutnya. Ilustrasi Gambar Siklus Akuntansi terdapat pada gambar 1.

UD. Darmansyah
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Penjualan	xxxx	
Retur Penjualan	(xxxx)	
Potongan Penjualan		(xxxx)
Penjualan Bersih		xxxx
Harga Pokok Penjualan :		
- Persediaan barang dagangan, 1 Januari 2013	xxxx	
- Pembelian	xxxx	
- Biaya angkut pembelian	<u>xxxx</u>	
- Pembelian Bersih	xxxx	
- Retur Pembelian	(xxxx)	
- Potongan Pembelian	<u>(xxxx)</u>	
- Harga Pokok Pembelian	<u>xxxx</u>	
- Barang Tersedia Untuk Dijual	xxxx	
- Persediaan Barang Dagangan Akhir	<u>(xxxx)</u>	
Harga Pokok Penjualan		(xxxx)
Laba Kotor		xxxx
Biaya Operasional :		
Biaya Penjualan	xxxx	
Biaya Administrasi dan Umum	<u>xxxx</u>	
Jumlah Biaya Operasional		(xxxx)
Laba Operasional		xxxx
Pendapatan dan Biaya Diluar Usaha :		
Pendapatan Sewa		xxxx
Biaya Bunga		<u>(xxxx)</u>
		<u>Xxxx</u>
Laba bersih sebelum pajak		<u>xxxx</u>
PPh		(xxx)
Laba Bersih		xxxx

UD. Darmansyah
Laporan Perubahan Modal
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013

Modal, Tn. Darmansyah, 1 Januari 2013		xxxxx
Laba bersih tahun berjalan	xxxxx	
Prive, Tn. Darmansyah	<u>(xxxxx)</u>	
Kenaikan atau penurunan modal		<u>xxxxx</u>
Modal, Tn. Sanjaya, 31 Desember 2013		<u>xxxxx</u>

UD. Darmansyah
Neraca
Per 31 Desember 2000

AKTIVA		
Aktiva Lancar :		
- Kas dan Setara Kas	xxxxx	
- Piutang Dagang	xxxxx	
- Persediaan Barang Dagangan		xxxxx
- Perlengkapan Toko	xxxxx	
- Sewa Dibayar Dimuka		xxxxx

- Lain-lain	<u>XXXXXX</u>	
Jumlah Aktiva Lancar		XXXXXX
Aktiva Tidak Lancar :		
- Tanah		XXXXXX
- Bangunan	XXXXXX	
- Akumulasi Depresiasi Bangunan	(XXXXXX)	
- Kendaraan	XXXXXX	
- Akumulasi Depresiasi Kendaraan	(XXXXXX)	
- Peralatan	XXXXXX	
- Akumulasi Depresiasi Peralatan	(XXXXXX)	
- Merk Dagang	<u>XXXXXX</u>	
Jumlah Aktiva Tidak Lancar		<u>XXXXXX</u>
TOTAL AKTIVA		<u>XXXXXX</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN :		
Kewajiban Lancar :		
- Utang dagang		XXXXXX
- Utang Pajak	<u>XXXXXX</u>	
Jumlah Kewajiban Lancar		XXXXXX
Kewajiban Tidak Lancar :		
- Utang Bank	XXXXXX	
- Utang Luar Negeri	<u>XXXXXX</u>	
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		<u>XXXXXX</u>
Jumlah Kewajiban		XXXXXX
EKUITAS :		
- Modal, Tn. Darmansyah		<u>XXXXXX</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>XXXXXX</u>

Kinerja Bisnis

Kegiatan operasional perusahaan perlu dilakukan penilaian sehingga akan memberi keberhasilan atau kegagalan suatu usaha bisnis. Kegiatan operasional bias berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu identifikasi ukuran dalam bentuk pengukuran sebagai berikut: yaitu: *pertama*, Pengukuran Efisiensi dengan membandingkan antara input aktual/input ideal menurut rencana. *Kedua*, Pengukuran Efektifitas dengan membandingkan antara output aktual/output ideal menurut rencana. *Ketiga*, Pengukuran Kualitas dengan membandingkan antara jumlah produk yang benar/total produk yang dihasilkan. *Keempat*, Pengukuran Ketepatan-waktuan dengan membandingkan antara jumlah produk yang dihasilkan tepat waktu/total produk yang

dihasilkan. *Kelima*, Pengukuran Produktivitas dengan membandingkan antara jumlah output/input

Kesimpulan

Perancangan sistem akuntansi dibangun dari fungsi pelaporan keuangan untuk tujuan laporan keuangan dan manfaat dari informasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Proses perancangan system akuntansi harus mempunyai kebijakan akuntansi yang memuat prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Jika SAK ETAP secara spesifik mengatur transaksi, kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP. Namun, entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SAK

ETAP jika dampaknya tidak material. Jika SAK ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, manajemen harus menggunakan pertimbangannya (judgement) untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan, reliable, dan wajar.

Kegiatan proses akuntansi dimulai dari pencatatan suatu peristiwa atau transaksi bisnis yangb direkam dalam suatu dokumen atau bukti transaksi baik secara eksternal maupun internal. Contoh dokumen adalah nota, kuitansi maupun faktur. Akuntansi akan mengakui kegiatan transaksi pertama kali dengan melakukan penjumlahan sesuai dengan pos atau rekening yang telah dibentuk sebelumnya. Selanjutnya, jurnal umum dan jurnal khusus dilakukan pemostingan ke buku pembantu dan buku besar, yang kemudian dikhtisarkan dalam neraca saldo. Aktivitas ini akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi comprehensive income, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Manfaat laporan keuangan adalah fungsinya untuk memberi informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Hasil informasi tersebut digunakan untuk analisis keuangan perusahaan dalam rangka memberi penilaian perusahaan dalam rangka melihat keberhasilan atau kegagalan suatu usaha bisnis.

Daftar Pustaka

- Arif, A. dan Wibowo. (2004). Akuntansi Untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah, Grasindo. Jakarta.
- Arifin, J dan Wicaksono, BA. (2006). Komputer Akuntansi dengan Microsoft Excel. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Barbara JO, Sandy HS, Allan LR (2000) Performance, firm size, and management problem solving. *Journal of Small Business Management* 38(4):42-58
- Benjamin, W.P., (1990). Laporan Keuangan (Ikhtisar Akuntansi) Perusahaan Kecil, Dalam, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya.
- Burke, J.F., (1997). Report on Standards Overload, *CPA Journal*, 66(3), p11.
- Handrimurtjahyo, Dedy dkk., (2007). Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Usaha Industri Gerabah Kasongan Bantul Yogyakarta . Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gudono. 2007. *Analisis Pengaruh Intensitas Moral terhadap Intensi Keperilakuan: Peranan Masalah Etika Kepersepsian dalam Pengambilan Keputusan Etis yang Terkait dengan Sistem Informasi*, Simposium Nasional X Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.
- Holmes, S. (1986). The role of practising accountants, accounting information and small business owner/manager. *Australia*, 259-284.
- Holmes, S., & Nicholls, D. (1988). An analysis of the use of accounting information by Australian small business. *Journal of Small Business Management*, 26 (2), 57 - 69.
- Holmes, S., & Nicholls, D. (1989). Modeling the accounting information requirements of small businesses. *Accounting and Business Research*, 19 (74), 143-150.
- Idrus. 2000, Akuntansi dan Pengusaha Kecil, medio Odober no. 7/thn/Maret 2000 hal50
- Koniyo, Andri dan Kusri, (2007), Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi Dengan Visual Basic Dan Microsoft SQL Server, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Knutson, D.L., & Wichmann, Jr, H., (1985). The Issue of Differential Accounting Treatment For American Small Businesses, *Management Forum*, Vol. 11 Sept.
- Muntoro, R. K. 1990, Praktek Akuntansi Keuangan, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya.

- McLeod, Jr, R. 2001. Sistem Informasi Manajemen (Versi Bahasa Indonesia), Jilid 1. Prenhallindo. Jakarta.
- Nair, R.D, Reittenberg, dan Larry, E., (1983). Privately Held Businesses: Is There a Standards Overload?, *Journal of Accountan*, New York.
- Najib, Mukhamad, 2006, Peningkatan Kinerja Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Pengembangan Orientasi Pasar, *Jurnal Manajemen Publikasi, Penelitian dan Review*.
- Peraturan tentang UKM. UU No. 9 Tahun 1995 tentang *Usaha Kecil*.
- Raharjo, M. D., & Ali, F. (1993). Faktor-faktor keuangan yang mempengaruhi usaha kecil dan menengah di Indonesia, Dalam K. James & N. Akrasanee, *Aspek-aspek finansial usaha kecil dan menengah; Studi kasus Asean*, (pp. 16-50). Jakarta: LP3ES.
- Republik Indonesia, (1995), Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta.
- Richardson, Frederick M., Wright, C. T. (1986). Standards Overload: A Case for Accountant Judgment, *The CPA Journal*, New York.
- Suhairi dan Wahdini (2006), Persepsi Akuntan Terhadap *Overbad* Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah, Makalah yang disampaikan pada SNAIX-Padang
- Suhairi, (2004), Personality, Accounting Knowledge, Accounting Information Usage And Performance: A Research On Entrepreneurship Of Indonesia Medium Industries, Disertasi, USM, Malaysia.
- Satyo, (2005). UKM dan Kebutuhan Standar, *Media Akuntansi*, 43(XII), 4.
- Tambunan, T. 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting. Salemba Empat. Jakarta.
- Tambunan, T. (2005), Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach: A Policy Experience from Indonesia, *Journal of Small Business Management*, Vol 43 No. 2, pp.138-154.
- Theng, Lau, Geok, and Jasmine Wang Boon, 1996, An Explanatory Study of Factors Affecting the Failure of Local Small and Medium Enterprise, *Asia Pacific Journal of Management*, Singapore. p.55-60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Wahyudi, Muhammad, 2009, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Yogyakarta, Tesis Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Williams, L.K., Chen, R.C., & Tearney, M.G., (1989). Accounting Standards: Overskill for Small Business, *The National Public Accountant*, June, pp 40-43.